**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DI PT. ADIRA DINAMIKA
MULTI FINANCE CABANG SUDIRMAN PEKANBARU**

Oleh: Dicky Wahyudi

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis

Pembimbing I: Dr. Hj. Mardalena Hanifah, S.H., M.Hum

Pembimbing II: Dasrol, S.H., M.H.

Alamat: Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia

Email: dw090899@gmail.com

ABSTRACT

An agreement is a legal relationship between two parties based on which one party has the right to demand something from the other party. The Consumer Financing Agreement is a reciprocal agreement in which one party (financial institution) provides its achievements in the form of financing (payment of funds) for the procurement of certain goods needed by the other party (consumers) with reciprocal achievements in the form of installment payments for the value of the financing provided. provided with interest and other fees. In practice, the debtor violates Article 3 paragraph 4, the debtor does not make installment payments according to the installment due date. But in reality, there are also many debtors who do not pay on the date specified in the agreement in Article 3 paragraph 4 and do not even pay at all, this is also called default. The purpose of writing this thesis: First, to find out the form of default in the implementation of motor vehicle financing agreements at PT. Adira Dinamika Multi Finance Branch Sudirman Pekanbaru. Second, to find out the settlement of defaults in the implementation of motor vehicle financing agreements at PT. Adira Dinamika Multi Finance Branch Sudirman Pekanbaru.

This type of research is sociological/empirical, namely a research approach that studies the influence of society on law, the extent to which the symptoms that exist in society can influence law and vice versa and departs from the paradigm of empirical science.

The research results show that creditors should be more selective and provide more convenience to consumers in granting credit, so that finance companies do not experience losses due to consumers who default, as well as debtors can easily get the vehicle they want and according to their abilities and the government should supervise and consumer protection, because consumers in this case are in a weak position. So it is necessary to supervise business activities in the field of goods and services

Keywords: Solution –Default– Financing Agreement

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Buku III tentang Perikatan, Perjanjian dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) bersifat terbuka dan menganut asas kebebasan berkontrak. Berarti bahwa setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum. contoh perjanjian yang tidak ada diatur di dalam KUHPerdata, tetapi berdasarkan asas yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang mengandung asas kebebasan membuat perjanjian.¹

PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sudirman Pekanbaru adalah perusahaan yang bergerak di sektor pembiayaan konsumen dalam hal kredit motor. PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sudirman Pekanbaru didirikan sejak tahun 1990, telah menjadi perusahaan pembiayaan terbesar saat ini yang melakukan pembiayaan berbagai merek otomotif di Indonesia berdasarkan ukuran pencapaian laba bersih, pencapaian pangsa pasar secara keseluruhan dan jumlah aset yang dikelola.

Dalam aktivitas usahanya melakukan pembiayaan terhadap konsumen, setiap bulannya PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sudirman Pekanbaru telah melakukan pembiayaan dengan jumlah yang berbeda. Sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang dilakukan antara PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sudirman Pekanbaru dengan debitur tersebut. Syarat-syarat perjanjian yang tercantum pada pasal 3 ayat 4 yaitu Debitur wajib membayar angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo selama jangka waktu pembiayaan hingga lunas (apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari libur, maka debitur wajib melakukan

pembayaran angsuran pada hari kerja terakhir sebelum hari libur).

Dalam pelaksanaannya debitur melanggar Pasal 3 ayat 4, debitur tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo angsuran. Namun pada kenyataannya, banyak juga debitur yang tidak membayar pada tanggal yang telah ditentukan dalam perjanjian yang ada di dalam Pasal 3 ayat 4 bahkan tidak membayar sama sekali. Hal ini disebut juga wanprestasi.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Dafitra selaku pegawai PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sudirman. Tindakan dari pihak debitur yang bernama Yudy Eskha tidak tepat yaitu tidak melakukan pembayaran selama 46 hari dari hari jatuh tempo sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian pembiayaan dengan nomor 060220129907. Tindakan dari pihak kreditur terhadap debitur yang melakukan wanprestasi adalah dengan cara melakukan panggilan telepon, jika dengan panggilan telepon debitur tidak juga membayarkan angsuran maka akan diberikan surat peringatan (somasi) sebanyak tiga kali. Jika melalui surat peringatan tidak berhasil membuat debitur membayar kewajibannya maka dilalukan gugatan sederhana oleh pihak kreditur melalui pengadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana bentuk dan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sudirman Pekanbaru. peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul tentang **“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DI PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG SUDIRMAN PEKANBARU.”**

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah isi perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor antara PT. Adira Dinamika Multi Finance dengan debitur ?
2. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kendaraan bermotor di PT. Adira Dinamika Multi Finance?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui isi perjanjian dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sudirman Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sudirman Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (S1) Program Hukum Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum perdata khususnya di bidang Perjanjian Pembiayaan kendaraan bermotor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sudirman Pekanbaru. Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan di dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang Perjanjian Pembiayaan

D. Kerangka Teori

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Secara Teoritis penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua yaitu litigasi dan non litigasi. Penyelesaian

sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan, dimana penyelesaian ini harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur formal di pengadilan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa lebih lama.² Non Litigasi adalah untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui perdamaian dan penangkalan sengketa dengan perancangan-perancangan kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi meliputi bidang yang sangat luas bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum.³

Penyelesaian secara non litigasi adalah salah satu penyelesaian diluar pengadilan yang biasanya disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).⁴

2. Teori Legal Culture

Budaya hukum merupakan suatu komponen penting dalam hal Penegakan Hukum. Teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa terdapat 3 unsur pembentuk sistem hukum yakni struktur hukum (*legal structure*) yaitu organ atau komponen struktural yang bergerak didalam suatu mekanisme, baik dalam hal pembuatan peraturan, ataupun dalam melaksanakan dan menerapkan peraturan, substansi hukum (*legal substance*) yaitu produk yang dibuat oleh struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan, dan

² Jimmy J.Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan(negosiasi, mediasi, konsiliasi & arbitrase)*. Visimedia, Jakarta, 2011, hlm. 6

³ I Wayan Wiryawan & I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Udayana University Press, Denpasar-Bali, hlm. 3

⁴ Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 8

budaya hukum (*legal culture*) yaitu pemikiran, nilai, serta harapan atas norma atau kaidah dalam kehidupan social masyarakat.⁵

M.Friedman membedakan dua subjek yang membentuk budaya hukum yaitu, budaya hukum eksternal yang mana secara global mencakup masyarakat luas dan budaya hukum internal yakni suatu budaya yang berkembang diarah aparat hukum (penegak hukum), keduanya saling berkaitan dan mempengaruhi. Apabila budaya hukum eksternal baik, maka budaya hukum internalnya juga menyesuaikan, karena pada dasarnya aparat penegak hukum merupakan produk yang berasal dari masyarakat sendiri. Budaya hukum tercipta dari pola-pola perilaku yang baik ataupun buruk dari masyarakat yang dibiarkan secara terus-menerus. Pola perilaku masyarakat yang terjadi secara berulang dapat menimbulkan kesepakatan dan mengikat dalam masyarakat.

Sistem hukum yang sehat dibentuk oleh budaya masyarakat yang baik, dan sistem hukum yang sakit terbentuk dari budaya hukum masyarakat yang buruk. Budaya hukum yang baik terwujud dalam suatu kesadaran hukum sebaliknya budaya hukum yang sakit dilahirkan dalam bentuk perasaan hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Penyelesaian adalah hal, cara, hasil, proses kerja menyelesaikan
2. Wanprestasi adalah debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
3. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

4. Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan termasuk kedalam jasa keuangan dan dapat dilakukan baik oleh bank ataupun lembaga keuangan non-bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan.
5. Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.
6. PT. Adira Dinamika Multi Finance (Adira Finance) adalah perusahaan pembiayaan yang didirikan pada tanggal 13 November 1990 dan memulai operasi secara komersial tahun 1991. Pembiayaan konsumen kendaraan bermotor terus dilakukan oleh PT. Adira Dinamika Finance hingga saat ini, di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Pekanbaru.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah sosiologis/empiris yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.⁶ Dengan menitik beratkan kepada penelitian lapangan. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan karena masalah yang di teliti

⁵ L. M. Friedman, *Sistem hukum perspektif ilmu sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 13

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013, hlm. 40

berkisar bagaimana penerapan hukum dalam masyarakat dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud mendeskriptifkan kenyataan yang diteliti secara jelas dan sistematis.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan menjadi objek dari penelitian ini adalah PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sudirman Jl. Jendral Sudirman No. 121 Pekanbaru Provinsi Riau, karena adanya debitur yang wanprestasi.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan analisis data kualitatif. Wawancara berbentuk sebuah informasi dan responden lalu dihubungkan dengan teori-teori yang ada, literatur yang berhubungan dengan permasalahan, penggunaan analisis data bersifat Kualitatif karena data yang terkumpul adalah data-data yang didapatkan dari hasil pengamatan dan selanjutnya mencari jalan permasalahan dengan menganalisis dan pada akhirnya dapat menarik kesimpulan memperoleh hasilnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Wanprestasi Para Pihak Yang Ada Di Dalam Perjanjian Pembiayaan

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁷ Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁸ Wanprestasi

terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁹

- a. Menurut Prodjodikoro, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.¹⁰ Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- c. Terlambat memenuhi prestasi.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang dilakukan.¹¹ Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya
Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta, 2008, hlm.180

⁸ Subekti, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2009, hlm. 146

⁹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 12

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 2000, hlm.17

¹¹ Ahmadi Miru, *Op. Cit*, hlm.74

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.¹²

Abdul Kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

a. Keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*).

b. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

Overmacht adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya, *Overmacht* dibagi dua yaitu:

a. *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.

b. *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengobanan dari debitur.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan

2. Wanprestasi Para Pihak Yang Ada Di Dalam Perjanjian Pembiayaan

Sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang dilakukan antara PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sudirman Pekanbaru dengan debitur tersebut. Syarat-syarat perjanjian yang tercantum pada pasal 3 ayat 4 yaitu Debitur wajib membayar angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo selama jangka waktu pembiayaan hingga lunas (apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari libur, maka debitur wajib melakukan pembayaran angsuran pada hari kerja terakhir sebelum hari libur).

Dalam pelaksanaannya debitur melanggar Pasal 3 ayat 4, debitur tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo angsuran. Pada kenyataannya, banyak juga debitur yang tidak membayar pada tanggal yang telah ditentukan dalam perjanjian yang ada di dalam Pasal 3 ayat 4 bahkan tidak membayar sama sekali.

Menurut Satrio terdapat tiga bentuk wanprestasi:

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Seorang debitur yang memiliki suatu prestasi terhadap si kreditur tetapi tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana yang telah di perjanjikan. Dalam hal ini debitur telah dikatakan wanprestasi jika hal itu dilakukan dengan kesadaran atau tanpa suatu keadaan yang memaksa debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya

Pelaksanaan mengenai waktu prestasi adalah suatu kewajiban jika hal itu sudah di tetapkan didalam perjanjian, yang mana ketepatan waktu itu menentukan suatu prestasi dapat dikatakan prestasi sesuai dengan keinginan si kreditur

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai

Debitur melaksanakan suatu prestasi tetapi dalam pelaksanaannya debitur melaksanakan apa yang berbeda dari isi perjanjian.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pembiayaan

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUHPdata, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya ada pula beberapa syarat untuk perjanjian yang berlaku umum tetapi diatur di luar Pasal 1320 KUHPdata, yaitu sebagai berikut:

¹² A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Jakarta, 1985, hlm.26

- a. Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, artinya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian itu dengan sukarela dan tanpa paksaan, serta dengan itikad yang benar-benar mau melaksanakan isi perjanjian yang disepakati.
- b. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, artinya isi dari perjanjian tidak dibenarkan bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat.
- c. Perjanjian harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan, artinya perjanjian yang telah disepakati harus mengkitui asas yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat.
- d. Perjanjian tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya kontrak yang dibuat tersebut tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan yang ada dalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan kerugian dalam masyarakat.¹³

Menurut Yahya Harahap perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹⁴ Berdasarkan teori, didalam suatu hukum perjanjian terdapat 5 asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata yaitu, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikad baik, dan asas

kepribadian. Berikut adalah penjelasan mengenai asas-asas yang dimaksud;

- a. Asas Kebebasan Berkontrak
Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, yang berbunyi; "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.
- b. Asas Konsensualisme
Asas Konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara dua pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Asas Kepastian Hukum
Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang buat oleh para pihak.
- d. Asas Itikad Baik
Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

¹³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.16

¹⁴ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet II, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm.6

e. Asas Kepribadian

Asas Kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.

2. Pengertian Perjanjian Pembiayaan

Pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi ataupun distribusi.¹⁵

Perusahaan yang memberikan pembiayaan disebut perusahaan pembiayaan konsumen atau *consumer finance company*. Perusahaan pembiayaan konsumen dapat didirikan oleh suatu institusi nonbank maupun oleh bank, tetapi pada dasarnya antara bank yang mendirikan dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang didirikan merupakan suatu badan usaha yang terpisah satu dengan yang lainnya.¹⁶

Pengertian dari Perusahaan Pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam Pasal 1 huruf (b) dikatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha diluar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.

Pengertian Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (7) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang

berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

3. Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan

Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen terdapat 3 (tiga) pihak yaitu:

- a. Pihak perusahaan Pembiayaan
Pihak perusahaan pembiayaan adalah pihak yang menyediakan dana bagi kepentingan konsumen. Perusahaan pembiayaan konsumen ini sesuai dengan Kepres Nomor 61 Tahun 1998 harus berbentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas atau Koperasi.¹⁷ Dalam transaksi pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen berkedudukan sebagai kreditur, yaitu pihak pemberi biaya kepada konsumen
- b. Pihak Dealer/Supplier
Pihak dealer/supplier adalah penjual, yaitu pihak yang menjual atau menyediakan barang yang dibutuhkan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen. Barang-barang yang disediakan pemasok adalah barang konsumsi. Pembayaran atas harga barang-barang yang dibutuhkan konsumen tersebut dibiayai atau dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada pemasok.
- c. Pihak Konsumen
Pihak Konsumen adalah pihak yang membeli barang yang dananya disediakan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Konsumen dapat berupa perseorangan maupun badan usaha. Dalam transaksi pembiayaan konsumen, konsumen berkedudukan sebagai debitur, yaitu

¹⁵ Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm 149.

¹⁶ Khotibul Umam, *Hukum lembaga Pembiayaan Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Sleman, 2010, hlm 36.

¹⁷ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 106

pihak penerima dana dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur.

4. Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan

Sesuai Pasal 1131 KUHPerdata, Semua barang yang dimiliki oleh pehutang, baik yang bergerak ataupun tidak bergerak, saat ini atau yang akan datang, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Inilah yang disebut sebagai jaminan umum. M. Bahsan berpendapat bahwa jaminan adalah “Segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam Masyarakat”.¹⁸

5. Berakhirnya perjanjian Pembiayaan

Suatu perjanjian baru akan berakhir apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya, berakhirnya perikatan tidak dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perikatan, dengan berakhirnya suatu perjanjian maka perikatan-perikatan yang terdapat didalam perjanjian tersebut secara otomatis menjadi hapus.

C. Tinjauan Umum Tentang Proses Penyelesaian Kasus Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan

1. Pengertian Penyelesaian Sengketa

Secara Teoretis penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua yaitu litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan, dimana penyelesaian ini harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur formal di pengadilan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa lebih lama.¹⁹ Non Litigasi

adalah untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui perdamaian dan penangkalan sengketa dengan perancangan-perancangan kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi meliputi bidang yang sangat luas bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum.²⁰

2. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya. Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Undang-undang tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999.

Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 5 ayat (1) pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Hakim. Dalam Undang-Undang ini diatur tentang alternatif penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa, ikhtisar khusus dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk arbitrase dan syarat pengangkatan arbiter serta mengatur mengenai hak ingkar dari para pihak yang bersengketa, tata cara untuk beracara di hadapan majelis arbitrase dan dimungkinkannya arbiter dapat mengambil putusan provisional atau putusan sela lainnya termasuk

¹⁸ M.Bahsan, Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Rejeki Agung, Jakarta, 2002, hlm. 148

¹⁹ Jimmy J.Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan(negosiasi, mediasi, konsiliasi & arbitrase)...* Op.cit. hlm. 6

²⁰ I Wayan Wiryawan & I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, ...* Op.cit. hlm. 3

menetapkan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang, atau menjual barang yang sudah rusak serta mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Bagaimanakah Isi Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sudirman Pekanbaru

Kesepakatan untuk membuat sebuah perjanjian juga memerlukan persetujuan bersama, hal ini diperlukan untuk mengikat individu supaya memahami kalau sebuah pernyataan yang ada akan dijadikan sebagai perjanjian.²¹ Persoalan kredit macet atau wanprestasi merupakan masalah utama dalam dunia usaha, namun potensi terjadinya kerugian yang diakibatkan sebelumnya dengan melakukan antisipasi yang baik oleh perusahaan pembiayaan agar tidak terganggu stabilitas dan kesehatan perusahaan dengan melakukan kegiatan bisnis. Standar moral yang menuntut tiap individu untuk menepati janji mereka tentu memiliki pengaruh penting pada perkembangan hukum kontrak.²²

Debitur dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti:

1. Syarat materiil, yaitu adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Debitur dengan dikehendaki dan diketahui oleh Debitur serta disadari sehingga menimbulkan kerugian pada kreditur yaitu PT. Adira Dinamika Multi Finance, dan adanya kelalaian yang dilakukan oleh Debitur yang wajib

berprestasi, seharusnya patut menduga bahwa perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian. Syarat formil, yaitu adanya peringatan yang dilakukan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance

PT. Adira Dinamika Multi Finance sebagai kreditur apabila syarat materiil yang dilakukan oleh debitur terpenuhi. Artinya bahwa apabila tidak terpenuhi maka PT. Adira Dinamika Multi Finance meminta advokat untuk segera mensomasi atau melakukan teguran hukum sebanyak 2 (dua) kali, jika tetap juga konsumen tidak melaksanakan prestasinya maka dilakukan tindakan eksekusi penarikan jaminan yang menjadi objek karena kekuatan dari penarikan jaminan eksekusi setara dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor antara debitur dan PT. Adira Dinamika Multi Finance adalah keterlambatan dana atau penunggakan pembayaran angsuran oleh debitur. Masalah keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran ini menjadi resiko yang harus dipikul oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance selaku perusahaan yang memberikan pembiayaan kepada debitur. Pasal yang dilanggar dalam perjanjian pembiayaan yaitu Pasal 3 ayat (4) yaitu Debitur wajib membayar angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo selama jangka waktu pembiayaan hingga lunas (apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari libur, maka debitur wajib melakukan pembayaran angsuran pada hari kerja terakhir sebelum hari libur). Sesuai dengan sampel yang telah diambil berikut adalah kasus keterlambatan pembayaran angsuran di PT. Adira Dinamika Multi Finance. Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban debitur berdasarkan

²¹ Lawrence M. Solan, "Contract as Agreement", Volume 83:1, issue 1 article 6, 2007, page 359

²² Westlaw, "Chapter 1 Contract Theory, Remedial Choices, and Relationships" *Jurnal Modern Law of Contract*, 1;3 Contract As Moral Duty, 201

perjanjian yang telah dibuat, debitur setuju untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Kreditur akan menyimpan bukti kepemilikan atas agunan beserta dokumen lain yang terkait dengan agunan sampai seluruh kewajiban debitur kepada kreditur dibayar lunas.
- b) Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian, maka debitur dilarang mengubah bentuk atau tata susunan barang/agunan, meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan barang/agunan kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga.
- c) Debitur wajib memelihara dan mengurus barang/agunan tersebut sebaik-baiknya dan melakukan pemeliharaan dan perbaikan atas biaya debitur dan bila ada bagian dari barang/agunan yang diganti atau ditambah maka bagian tersebut termasuk dalam penyerahan barang/agunan kepada kreditur.
- d) Kreditur atau wakilnya berhak untuk setiap waktu, atas beban/biaya debitur untuk: memasuki agunan tersebut, memeriksa keadaan agunan, menempatkan atau membuat tanda pada agunan yang menunjukkan hak dan kepentingan kreditur
- e) Selama jangka waktu perjanjian, segala beban pajak dan atau beban lainnya atas agunan baik sekarang maupun dikemudian hari akan menjadi beban debitur. Selama jangka waktu perjanjian, debitur wajib mengasuransikan barang/agunan atau objek lainnya yang dapat diasuransikan melalui rekanan asuransi kreditur yang ditawarkan. Debitur wajib segera melaporkan kepada kreditur atas hal-hal yang dipertanggungjawabkan oleh pihak asuransi dalam waktu 24 jam setelah kejadian tersebut berlangsung. Ketentuan ini tidak dapat dijadikan alasan bagi debitur untuk menunda kewajiban pembayaran angsuran.

f) Apabila terjadi keadaan cidera janji/wanprestasi, maka debitur wajib untuk:

- i. melunasi seluruh kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian ini secara seketika dan sekaligus.
- ii. menyerahkan agunan/barang kepada kreditur secara sukarela, kapanpun dan dimanapun.
- iii. Meminta kreditur untuk menjual agunan/barang atas nama debitur dengan mekanisme pelelangan umum atau dibawah tangan atau dengan perantara pihak lain dengan harga pasar yang layak.

Setelah barang/agunan diterima oleh kreditur, kreditur berhak:

- i. Melaksanakan penjualan agunan/barang.
- ii. Menghadap kepada siapapun dan dimanapun, memberikan dan meminta keterangan, membuat/menyuruh membuat/akta/perjanjian, menandatangani tanda penerimaannya, menyerahkan agunan/barang kepada yang berha menerimanya dan;
- iii. Melakukan tindakan yang diperlukan hingga tercapainya penjualan barang/agunan tersebut.

Tabel 4.1
Debitur Wanprestasi

No	Debitur	Wanprestasi
1	Yudy	Debitur tidak membayar angsuran kepada pihak kreditur setelah tanggal jatuh tempo dengan keterlambatan pembayaran 46 hari
2	Yuhendra	Debitur tidak membayar angsuran kepada pihak kreditur

		setelah tanggal jatuh tempo dengan keterlambatan pembayaran 28 hari
3	Ery	Debitur tidak membayar angsuran kepada pihak kreditur setelah tanggal jatuh tempo dengan keterlambatan pembayaran 61 hari

B. Apakah Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sudirman Pekanbaru

Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sudirman Pekanbaru bisa dibedakan menjadi dua yaitu dari dalam dan luar. Faktor dari dalam yaitu adanya karyawan yang mengenal calon debitur karena mengenal calon konsumen maka karyawan akan membantu dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor di PT. Adira Multi Finance, karena mengenal calon debitur tersebut maka proses pengajuan permohonan pembiayaan sampai pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor menjadi mudah. Hal ini dikarenakan adanya bantuan yang diberikan oleh karyawan yang kenal dengan calon debitur tersebut dengan memudahkan persyaratan seperti pada syarat awal pengajuan permohonan apabila ada kekurangan seperti identitas di kartu tanda penduduk tidak sesuai dengan tempat tinggal saat ini, proses survey lapangan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan lain-lain, sehingga calon debitur tersebut dapat diterima sebagai

debitur pada perusahaan pembiayaan tersebut.

Pada penjualan secara kredit diterapkannya *system target*. *System target* merupakan target minimal penjualan pada karyawan yang setiap bulannya harus dipenuhi. *System target* menjadi beban bagi karyawan dimana dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor karyawan yang melakukan atau yang ditugaskan untuk survey lapangan sangat penting karena merupakan syarat awal sebelum ditanda tangan surat perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Karena adanya target yang diberikan oleh perusahaan menyebabkan karyawan lebih mengejar target dalam mendapatkan konsumen dalam pembelian secara kredit, hal ini kemudian menjadi dasar penyebab banyak diabaikannya aturan-aturan dalam pelaksanaan survey lapangan yang kemudian menyebabkan tidak harmonisnya hubungan hukum para pihak.

Selain faktor dari dalam ada juga penyebab dari luar, adapun faktor dari luar tersebut adalah ketidakmampuan debitur secara ekonomi. Ketidakmampuan debitur disini bisa saja terjadi karena ada kebutuhan mendesak diluar perhitungan debitur seperti sakit yang mengharuskan debitur mengeluarkan biaya tambahan atau kebutuhan tambahan mendesak seperti kebutuhan biaya anak untuk sekolah dan lain-lain sehingga menyebabkan debitur terlambat untuk membayar angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo, meskipun terlambat satu hari saja hal ini sudah dapat dikatakan wanprestasi. Karena terlambat maka kreditur memberikan sanksi berupa denda sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut mengenai berapa denda yang dikenakan kepada debitur yang terlambat membayar angsuran diputuskan oleh pihak kreditur, denda keterlambatan tersebut diberlakukan tiap hari apabila tidak membayar angsuran yang terlambat maka denda keterlambatan akan bertambah setiap harinya.

Karena terpuruknya status ekonomi konsumen dan denda yang semakin meningkat tiap harinya maka konsumen tidak sanggup lagi untuk melaksanakan pembayaran lagi. Status ekonomi konsumen diatas juga bisa berhubungan dengan karyawan yang mengenal konsumen dan karyawan yang mengejar target tersebut, dikarenakan tidak dilaksanakan proses pelaksanaan perjanjian dengan semestinya menimbulkan wanprestasi dikemudian hari berupa terlambat membayar apa yang sudah disepakati dalam perjanjian.

Debitur pertama yang bernama Yudy adalah perseorangan yang melakukan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Debitur melakukan pembelian kendaraan bermotor pada bulan Desember 2020 melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance. Setelah melakukan pembayaran selama 3 bulan debitur tidak melanjutkan pembayarannya dan sudah terlambat melakukan pembayaran selama 46 hari. Debitur pertama tidak melakukan pembayaran karena ketidakmampuan ekonomi pada saat tanggal jatuh tempo ketika sedang terkena pengaruh covid-19 yang mengharuskan debitur untuk dirawat dirumah sakit dan mengeluarkan biaya diluar perhitungan debitur.

Debitur kedua bernama Yuhendra adalah perseorangan yang melakukan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Debitur melakukan pembelian kendaraan bermotor pada bulan Januari 2019 melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance. Setelah melakukan pembayaran angsuran selama 31 bulan debitur tidak melanjutkan pembayarannya dan sudah terlambat melakukan pembayaran selama 28 hari. Debitur kedua tidak melanjutkan pembayarannya dikarenakan ketidakmampuan ekonomi karena usaha pangkas rambut dari debitur terkena dampak covid-19 yang menyebabkan perputaran ekonomi debitur tidak berjalan lancar dan tidak mampu membayar

angsuran maupun membayar biaya anaknya.

Debitur ketiga bernama Ery adalah perseorangan melakukan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Debitur melakukan pembelian kendaraan bermotor pada bulan November 2020 melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance. Setelah melakukan pembayaran angsuran selama 8 bulan debitur tidak melanjutkan pembayarannya dan sudah terlambat melakukan pembayaran selama 61 hari. Debitur ketiga tidak melakukan pembayaran karena perusahaan tempat debitur bekerja melakukan pengakhiran hubungan kerja untuk mengurangi biaya perusahaan karena profit perusahaan pada saat itu tidak mencukupi untuk menggaji debitur.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Isi perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor di PT. Adira Dinamika Multi Finance dengan debitur yaitu kreditur dan debitur telah saling setuju untuk membuat, menetapkan, melaksanakan dan mematuhi perjanjian yang telah dibuat dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan. Kesepakatan untuk membuat sebuah perjanjian juga memerlukan persetujuan bersama, hal ini diperlukan untuk mengikat individu supaya memahami kalau sebuah pernyataan yang ada akan dijadikan sebagai perjanjian. Dalam menyelesaikan permasalahan akibat wanprestasi PT. Adira Dinamika Multi Finance menggunakan sistim “prosedur penanganan terhadap konsumen bermasalah” yang dibagi dalam beberapa tahapan.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi di PT. Adira Dinamika Multi Finance bisa disebabkan dari karyawan maupun debitur. Hal ini

dikarenakan karyawan yang mengejar target ataupun memudahkan debitur untuk melengkapi syarat-syarat dalam melakukan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dan debitur yang tidak memperhitungkan pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dalam bab pembahasan, adapun saran dari penulis sesuai dengan permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Kreditur sebaiknya mempertimbangkan isi perjanjian pembiayaan dan melakukan pengawasan terhadap pegawai yang melakukan *survey* sebelum melakukan perjanjian pembiayaan kepada debitur. Debitur harus mempertimbangkan isi perjanjian yang dibuat terkait dengan pembiayaan agar tidak terjadi wanprestasi kedepannya.
2. Kreditur hendaknya lebih selektif dan lebih memberikan kemudahan kepada konsumen dalam pemberian kredit, sehingga perusahaan pembiayaan tidak mengalami kerugian akibat konsumen yang melakukan wanprestasi begitu juga para debitur dapat dengan mudah mendapatkan kendaraan yang diinginkan dan sesuai dengan kemampuannya. Calon debitur hendaknya memperhitungkan segala sesuatu sebelum memutuskan untuk mengajukan perjanjian pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru, S. P. 2008. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Artadi, I. W. 2010. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Denpasar: Udayana University
- Friedman, L. M. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Fuady, M. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.

- Ibrahim, J. 2013. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Meliala, A. Q. 1985. *Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjodikoro, W. 2004. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Salim, S. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sembiring, J. J. 2011. *Cara menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (negosiasi, mediasi, konsiliasi & arbitrase)*. Jakarta: Visimedia.
- Subekti. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Arga Printing.
- Sunaryo. 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Umam, K. 2010. *Hukum Lembaga Pembiayaan Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*. Sleman: Pustaka Yustisia.
- Usmani, R. 2012. *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Y. Sri Susilo, S. T. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.

B. Jurnal

- Solan, L. M. 2007. Contract ad Agreement. Volume 83:1, issue 1 article 6, 359.
- Westlaw. Chapter 1 Contract Theory, Remedial Choices, And Relationships. *Jurnal Modern Law of Contract*, 201.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Surat Keputusan Menteri Keuangan No.
1251/KMK.013/1988 tanggal 20
Desember 1988